

Tesis Revisi Ribert Susanto MIK

by Ribert Susanto MIK

Submission date: 21-Mar-2024 11:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2326497047

File name: 228080021_RIBERT_SUSANTO_MIK_-_Ribert_Susanto_1.pdf (306.64K)

Word count: 5740

Character count: 38617

**POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT PANDEMI COVID 19**

**TESIS
BAB 1 – 4 - 5**



Oleh:

Ribert Susanto

NPM: 228080021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PASCA SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi baik kepada individu maupun kelompok, dapat berupa verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan, dimana informasi yang disampaikan berupa ide-ide, maupun keputusan diambil lebih mudah diterima karena secara langsung dapat dijelaskan, dibandingkan komunikasi nonverbal. Komunikasi non verbal yaitu proses penyampaian pesan yang menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, maupun simbol-simbol yang ada, seperti contoh di negara ini, ketika menggunakan kepala dapat diartikan bahwa mengatakan "iya".

Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa lain yaitu *communicare*, yang dalam bahasa lain mempunyai arti berpartisipasi, atau berasal dari kata *communis* yang berarti sama. Bahwa seseorang yang berkomunikasi, mengharapkan agar orang lain dapat ikut serta berpartisipasi atau bertindak sama sesuai dengan tujuan, harapan atau isi pesan yang disampaikan. Jadi komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dari sejak lahir dan selama kehidupan tidak lepas dari namanya komunikasi. Setiap tindakan akan ada namanya komunikasi, baik secara individu, antara orang atau lebih bahkan kelompok.

Implementasi⁴ adalah pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Prof. H. Tachjan mengartikan implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/dsetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan implementasi. Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan. (Tachjan, 2010: 25).

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis, selain itu konsep² good governance, Reformasi Birokrasi muncul sebagai upaya menyeluruh dan komprehensif atas perbaikan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini peningkatan pelayanan publik yang mendukung visi misi Pemprov Jawa Barat di antaranya adalah peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keprotokolan di lingkungan Pemprov Jabar. Perkembangan revolusi Industri 4.0 serta perubahan

paradigma birokrasi 3.0 menuju dynamic governance menuntut pengelolaan pemerintahan segera berubah dari yang tadinya lambat menjadi cepat serta mengikuti perkembangan tuntutan jaman dan masyarakat, segala hambatan tidak efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan perlu diatasi demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3).

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Kurniawan (2005:6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Ratulito (2005) mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Sinambela (2016) pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap kegiatan yang menguntungkan

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Trllestari (Hardlyansyah, 2018:48) mengemukakan “terdapat 3 orientasi kualitas yang harus konsisten antar satu dengan lainnya, yaitu persepsi pelanggan, produk dan proses”.

Pada dasarnya kata “Kualitas” itu sendiri mempunyai banyak makna, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas dapat dikatakan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf dari suatu hal, atau disebut juga sebagai mutu. Dalam hal ini yaitu terkait mutu pelayanan, maka hal penting yang selalu dijunjung dalam perbaikan kualitas pelayanan ialah kepuasan pelanggan. Pendapat lain menyatakan kualitas sebagai usaha yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan pelanggan (dalam Hardlyansyah, 2018:49). Pendapat tersebut didukung dengan pengertian kualitas pelayanan dari Goetsch & Davis dalam (Tilptono dkk, 2005), kualitas pelayanan “ialah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan”. Dengan demikian suatu pelayanan yang berkualitas harus dapat menyediakan produk dan jasa pelayanan yang memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang berikan, maka perlu ada kriteria atau indikator yang dapat menunjukkan baik buruknya suatu pelayanan publik tersebut.

Berhubungan dengan hal tersebut, Zelthaml et. Al.(1988) mengemukakan bahwa : “SERVOQUAL is an empirically derived method that may be used by a services organization to improve service quality. The method involves the development of an

understanding of the perceived service needs of target customers. These measured perceptions of service quality for the organization in question, are then compared against an organization that is “excellent”. The resulting gap analysis may then be used as a driver for service quality improvement” (Hardlyansyah, 2018:55).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang dilakukan secara intensif mulai dari awal bulan Maret 2020 telah dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19, mengingat adanya kebijakan untuk tetap melakukan aktivitas di rumah mulai dari bekerja, belajar hingga beribadah, sehingga menurunkan angka interaksi sosial yang terjadi di ruang publik dan secara otomatis menurunkan potensi penyebaran COVID-19.

Upaya penanggulangan COVID-19 secara empiris tidak hanya memberi dampak positif, tetapi juga memberi dampak negatif baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, salah satu dampak negatif tersebut yaitu penurunan tingkat ekonomi masyarakat yang mana menurut Menteri Keuangan diproyeksikan akan ada penambahan sebesar 1,1 (satu koma satu) juta jiwa penduduk miskin baru, sedangkan menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1,5 (satu setengah) bulan selama penanggulangan COVID-19 telah terjadi penambahan pengangguran sebanyak 2 (dua) juta jiwa. Lebih lanjut pemerintah memproyeksikan wabah COVID-19 dapat berdampak lebih besar lagi apabila tidak dilakukan upaya pemulhan sektor perekonomian (Anggraeni, 2020; Fajar, 2020). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dampak COVID-19 mulai dari pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin sampai dengan bantuan

Intensif kepada sektorsektor tertentu seperti bantuan bagi para petani dan nelayan agar di satu sisi dapat membantu para petani dan nelayan agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidup, juga untuk menggerakkan sektor perekonomian di bidang pertanian dan perikanan (Sekretariat Kabinet, 2020).

Bantuan sosial tersebut pada dasarnya merupakan bantuan sektoral yang tidak akan berlangsung selamanya yang mana rumah tangga sasaran (RTS) bantuan sosial diharapkan mampu pulih kembali ketika bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berakhir atau dihentikan. Upaya yang secara sistemis dan menyeluruh perlu dilakukan oleh pemerintah guna dapat memulihkan kembali sektor perekonomian, salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu menanggulangi COVID-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah “new normal”.

Kebijakan tatanan normal baru didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi COVID-19 belum ditemukan (Gunla, 2020). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana kondisi sebelum adanya COVID-19 dengan tetap melakukan kewaspadaan terhadap potensi penularan COVID-19. Di sisi lain pemerintah tidak bisa memblarkan masyarakat untuk tetap berada di rumah dikarenakan dampak ekonomi dan sosial yang akan muncul memiliki potensi untuk memperbesar angka kemiskinan dan pengangguran yang selama penanggulangan COVID-19 telah banyak

berdampak kepada masyarakat, khususnya terhadap peningkatan angka kemiskinan baru dan pengangguran baru.

Kebijakan tatanan normal baru mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas normal sebagaimana sebelum adanya COVID-19 dengan penekanan kepada kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu: Pertama, adanya tingkat penularan COVID-19 R_0 (basic reproductive number) di bawah angka 1 (satu) atau tingkat penularan COVID-19 berada di bawah 1 (satu) orang.

Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi COVID-19 di suatu daerah tidak melebihi dari 60% dari jumlah total infrastruktur kesehatan yang digunakan di masing-masing daerah tersebut. Ketiga, adanya jumlah tes yang dilakukan terhadap COVID-19 bagi masyarakat yang layak dan memadai disesuaikan dengan cakupan jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap daerah (Hakim, 2020). Adanya pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru tersebut diharapkan mampu menggerakkan aktivitas masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi sehingga sektor-sektor ekonomi baik sektor formal maupun sektor informal dapat kembali pulih seperti semula dan dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh adanya COVID-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana menjadi salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota menyambut kebijakan tatanan normal baru yang dibuat

oleh pemerintah sebagai peluang dalam upaya untuk mengembalikan kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan kondisi menjadi pulih seperti kondisi sebelum adanya wabah COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang pada dasarnya memberikan pedoman bagi pemerintah Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan kebijakan PSBB secara proporsional, kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kebijakan AKB mengatur bagaimana para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk mempraktekan kegiatan di ruang publik dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan beradaptasi kepada kebiasaan baru yaitu kegiatan yang didasarkan kepada protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Kebijakan AKB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunculkan pertanyaan baik secara konseptual maupun secara empiris. Dalam tataran konseptual apakah kebijakan AKB tersebut merupakan kebijakan yang memiliki kesamaan konsep dengan kebijakan tatanan normal baru sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau merupakan kebijakan yang berbeda? Dalam konteks ini, apakah makna adaptasi dilihat dari perspektif substansi kebijakan? Pola adaptasi serta nilai apa yang menjadi dasar untuk dijadikan pedoman dalam mendorong masyarakat untuk merubah perilaku dan kegiatannya?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus meningkatkan kewaspadaan untuk menekan potensi penularan COVID-19. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 443/134/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan COVID-19 yang ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 12/9/20.

Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, surat edaran tersebut dikeluarkan karena adanya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta dan wilayah Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi).

Daud berharap dengan terbitnya surat edaran tersebut, kewaspadaan semua daerah terhadap COVID-19 di Jabar meningkat. Selain itu, bupati dan wali kota diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. "Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Jabar efektif dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19,"

Kebljakan AKB dilihat secara empiris mengkonstruksikan pertanyaan yang timbul dari adanya penetapan Kebljakan AKB yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya dari penanggulangan COVID-19 dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebljakan AKB tersebut. salah satu aktivitas masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan kebiasaan baru adalah aktivitas 'Komunkasi'. Aktivitas yang biasa dilakukan secara langsung atau bertatap muka tidak lagi dilakukan melainkan secara online dengan sistem komunikasi jarak jauh.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya fenomena komunikasi baru yang dialami orang-orang dalam proses adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “POLA KOMUNIKASI IMPLEMENTASI ADAPTASI KEHLAKSAAAN BARU PETUGAS PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PANDEMI COVID-19”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini akan difokuskan pada “POLA KOMUNIKASI IMPLEMENTASI ADAPTASI KEHLAKSAAAN BARU PETUGAS PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PANDEMI COVID-19”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan penelitian ke beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 pada petugas protokol provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan petugas pada pola komunikasi implementasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 pada petugas pemerintahan provinsi Jawa Barat dalam mengkomunikasikan protokol kesehatan guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19

3. bagaimana tanggapan Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menerima pola komunikasi petugas dalam implementasi adaptasi kebiasaan baru (AKB) pasca pandemi COVID-19?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis Pola Komunikasi Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pasca Pandemi COVID-19 Pada Petugas Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisis motivasi pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid-19 pada petugas protokol provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui perkembangan petugas dalam menjalankan pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid-19 di pemerintahan provinsi Jawa Barat guna memutus mata rantai covid-19
3. Untuk mengetahui tanggapan atau respon masyarakat dalam menerima adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid-19

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yakni:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan informasi yang berguna dalam mengkaji mengenai Pola Komunikasi Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi COVID-19 pada Petugas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

1. Bagi Peneliti, diharapkan memberi pengalaman untuk peneliti agar bisa berpikir dengan analisis dan dinamis untuk masa selanjutnya dan sebagai bentuk penerapan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh saat menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi masukan kepada pihak khususnya kepada masyarakat sebagaimana penambah wawasan mengenai pencegahan COVID-19 yang terpapar di seluruh wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagi Instansi Petugas Kesehatan, diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Pola Komunikasi Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19 pada Petugas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Ilmu yang terdapat dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru dalam diri peneliti.
2. hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan petugas terhadap Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Barat.

BAB LV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan deskripsi dari data yang sudah diperoleh melalui hasil wawancara di lapangan dengan metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Di sini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung tentang pola komunikasi dan Implementasi Petugas covid-19 di Jawa Barat. Penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang dilakukan oleh sumber data.

Penelitian yang dilakukan pada Februari – April 2022 terhadap 2 Narasumber adalah sebagai berikut : Komunikasi Antarprbadl : Kedua narasumber berpendapat bahwa mereka melakukan sosialisasi tidak menggunakan komunikasi antarprbadl seperti yang dikatakan oleh Petugas Prokes Covid-19, dia berpendapat bahwa “ kami melakukan sosialisasi tidak ada menggunakan komunikasi tersebut karena kami saat itu rencananya akan melakukan interaksi menggunakan toak keliling dari kampung ke kampung untuk mengajak masyarakat ikut dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tiap Wilayah”. Narasumber juga berpendapat “bahwa iya tidak ada

komunikasi kepada masyarakat dengan melalui tatap muka secara langsung namun rencananya kami akan melakukan pengumuman dengan cara keliling menggunakan toak” dan karena pada saat itu juga lingkungan masyarakat belum kondusif akibat covid-19 yang membuat masyarakat tetap waspada dan berada di rumah. Saat menyampaikan informasi vaksinasi narasumber berpendapat bahwa adanya hambatan saat sosialisasi keliling. Dimana faktor hambatan saat menyampaikan informasi menggunakan toak keliling dalam komunikasi tersebut yaitu hambatan ekologis. Hambatan ekologis terjadi oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Seperti suara riuh orang-orang atau lalu lintas, suara hujan, dan lain-lain.

Komunikasi Kelompok : Komunikasi kelompok tidak jauh berbeda dengan komunikasi pribadi hanya saja yang membedakan disini yaitu komunikasi kelompok berada dalam pengarahannya seorang pemimpin untuk mencapai tujuan ataupun sasaran bersama. Menurut kedua narasumber berpendapat bahwa interaksi kelompok dilakukan dengan adanya pengarahannya dari seorang pemimpin. Narasumber mengatakan “secara kelompok kami saat itu pertama kali dikumpulkan dari berbagai kelompok seperti nakes, polisi, Mul, dan sebagainya di kantor bupati dengan proses yang ketat. Kami diperintahkan oleh dinas kesehatan untuk menyampaikan informasi bahwa akan ada Penanganan AKB kepada masyarakat”. Tidak hanya itu selaku Kapus juga menyampaikan informasi vaksin kepada bapak Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menyampaikan kepada masyarakat akan ada pelaksanaan vaksin covid-19.

Setelah menyampaikan informasi vaksinasi covid-19 lalu bagaimana cara petugas kesehatan mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk pelaksanaan program

vaksinasi covid-19, menurut kedua narasumber mereka mengajak masyarakat dengan cara memberi informasi seperti yang di anjurkan pemerintah bahwa masyarakat harus melakukan vaksinasi karena vaksin dapat menanggulangi virus covid-19. Narasumber berpendapat “Sesuai dengan anjuran pemerintah kami hanya memberi informasi bahwa vaksin harus dilaksanakan dan MUL juga sudah telah menyetujui pelaksanaan vaksin.”. Ibu Rusmanar “menurut saya kembali lagi atas kesadaran mereka masing-masing mau ikut vaksinasi atau tidak”. Artinya mereka sudah berusaha menyampaikan informasi vaksinasi covid-19 dengan baik.

4.1.1 Kinerja dan Pola Petugas Protokol Kesehatan Covid-19 di Jawa Barat

Hasil dari penelitian tentang Kinerja dan Pola Petugas Protokol Kesehatan Covid-19 di Jawa Barat. Hasil dari penelitian wawancara ini Sodara Lman Firmansyah, S.S sebagai Petugas Protokol Covid-19 di Jawa Barat. Dengan adanya hasil Wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa informasi tentang Kinerja Petugas selama Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Petugas Protokol ketika bekerja dilapangan pada pandemi Covid-19 tentunya banyak hal yang dilakukan itu pertama mungkin bisa diklasifikasikan pada alat kesehatan yaitu :

1. Masker
2. sarung tangan Medis
3. Sarung Microfone
4. Handsanitizer

Dari keempat item tersebut yang harus petugas protokol siapkan dan digunakan kepada petugas protokol sendiri untuk mengurangi terjadinya penularan. Dan ada beberapa peraturan yang harus dilakukan pada petugas protokol saat berada di lapangan seperti Jaga Jarak, penyesuaian jumlah orang pada undangan acara tertentu biasanya dalam acara undangan tersebut memiliki fasilitas 1000 orang disesuaikan lagi menjadi 500 atau 250 orang dari jumlah fasilitas undangan dan memberikan jarak kepada tamu undangan. Jadi sebagai petugas protokol Covid-19 selain melayani pimpinan dan melayani masyarakat pada normal dan pandemi tentunya ada perbedaan-perbedaan. Seperti timbulnya peraturan-peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat yang harus diikuti oleh petugas proses Covid-19 dengan melalui adaptasi walaupun itu awalnya sangat susah tetapi lama kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Walaupun petugas proses mengikuti Peraturan yang diturunkan oleh pimpinan masih saja ada yang terpapar Covid-19 ada sebanyak 43 petugas tenaga kesehatan (nakes) yang kini terkonfirmasi terpapar positif Covid-19. menjelaskan angka itu bertambah dari sebelumnya, di mana pada saat itu ditemukan sebanyak 42 orang nakes terkonfirmasi Covid-19. Rita menyebutkan, seluruh nakes yang terpapar positif Covid-19 itu berasal dari 16 rumah sakit yang ada di Kota Bandung setelah adanya pemeriksaan tes usap.

4.1.2 Perkembangan petugas dalam menjalankan pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid-19 di pemerintahan provinsi Jawa Barat guna memutus mata rantai covid-19

Dalam hal ini kita dapat mengetahui bagaimana Petugas Prokes Covid-19 dalam melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease di Prov. Jawa Barat dan apa saja tugas-tugas tim satgas yang membantu masyarakat dalam memulihkan kembali dampak sosial akibat Covid-19 dari tim satgas tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak Corona Virus Disease 2019. Dengan harapan adanya petugas Prokes Covid-19 dapat menyadarkan dan membantu mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Jawa Barat.

Perkembangan Petugas dalam menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru Khususnya di Jawa Barat berkembang pesat dengan adanya aturan-aturan yang ditegakkan oleh petugas Covid-19 sehingga memberi efek jera kepada masyarakat sehingga mau tidak mau masyarakat mengikuti dan menaati peraturan tersebut demi menghindari peningkatan Covid-19 berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan. Hal ini kurang sejalan dengan teori dan aplikasi di lapangan. Peneliti mengamati bahwa para petugas melakukan komunikasi regulatif dengan represif dan penuh paksaan sehingga masyarakat bergejolak antara mengikuti aturan protokol kesehatan atau kebutuhan harian mereka yang akan habis setiap harinya. Mekanismenya dilakukan secara rutin, yaitu, untuk tiap kecamatan dalam 1 minggu dilaksanakan 3 kali penertiban. Diantaranya pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pada malam hari. Bahkan secara berkala dilakukan swab antigen di tempat apabila dirasa melanggar peringatan protokol kesehatan. Untuk di tempat-tempat seperti warnet dan warung kopi yang ramai setiap waktunya, peneliti.

Pemangku kewenangan bertindak cukup tegas dalam pelanggaran kebijakan ini yaitu dari unsur petugas penertiban yang melaporkan pelanggaran masyarakat kemudian memberikan peringatan L dan LL. Yaitu berupa teguran berupa ketentuan denda pada pelaku yang tidak patuh. Kemudian apabila sampai dengan peringatan LLL, akan dikenai sanksi administratif dan penutupan tempat usaha selama 14 hari berturut-turut. Apabila masih terindikasi melakukan pelanggaran yang sama setelah teguran-teguran tersebut, maka izin usahanya yang bersangkutan akan dicabut sampai waktu yang ditentukan beriring dengan sanksi administratif yang melekat.

4.1.3 Bagaimana tanggapan masyarakat provinsi Jawa Barat dalam menerima pola komunikasi petugas dalam implementasi adaptasi kebiasaan baru (AKB) pasca pandemi COVID-19?

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang berfokus pada Bagaimana Tanggapan Masyarakat Prov Jawa Barat dalam menerima Pola Komunikasi Petugas dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini maka dapat dikemukakan hasil wawancara pada kepercayaan masyarakat terdapat frekuensi kemunculan sebanyak sepuluh kali dengan empat hasil coding diantaranya adalah respon dimana warga ada yang tidak percaya terhadap Covid-19, pandemi Covid-19 bagian dari rekayasa, hanya sebagian warga yang percaya Covid-19, tidak pernah melihat orang disekitarnya terpapar Covid-19. Adapun hasil wawancara terkait tanggapan masyarakat terhadap petugas dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi Covid-19. Dapat dilihat dari sekarang masyarakat masih

banyak yang menentang atau melanggar aturan yang sudah petugas himbaukan dari pertama Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang PSBB / Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sehingga dapat petugas melakukan peneguran keras dengan sanksi denda bagi masyarakat agar memberikan efek jera kepada masyarakat.

Dan tidak semua masyarakat yang masih melanggar tetapi ada juga masyarakat yang mendukung dan menerima tindakan petugas dalam memberikan aturan demi menyelamatkan ekonomi seluruh masyarakat Jawa Barat, mereka juga melakukan aktifitas seperti biasa dengan mengikuti aturan pemerintah agar mereka bisa beraktifitas seperti biasa demi menghidupi keluarganya. AKB akan mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Dalam setiap beraktifitas di luar rumah, masyarakat wajib menggunakan masker, sering mencuci tangan, serta wajib jaga jarak aman minimal 1,5 meter dengan orang lain. Sebelum pandemi, kita umumnya tidak melakukan hal ini.

Warga juga disarankan tak melakukan sentuhan fisik seperti berjabat tangan, melakukan tos, menepuk pundak atau punggung, atau pun mencium tangan/plpl. Apabila tidak ada kebutuhan mendesak agar tidak keluar rumah, hindari keramaian atau kerumunan orang banyak. Inilah sejumlah penyesuaian yang perlu dilakukan dalam AKB, termasuk di berbagai sektor penting, seperti rumah ibadah, industri dan perkantoran, ritel, pasar rakyat dan pasar modern, sektor pariwisata, maupun pendidikan juga diberlakukan protokol yang ketat.

4.2 Pembahasan

1.2.1 Pembahasan mengenai motivasi pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid-19 pada petugas protokol provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja dan pola petugas protokol kesehatan Covid-19 di Jawa Barat, terdapat beberapa temuan penting yang menggambarkan bagaimana petugas protokol beradaptasi dengan situasi pandemi.

1. Peralatan Kesehatan yang Digunakan

Petugas protokol menggunakan berbagai peralatan kesehatan seperti masker, sarung tangan medis, sarung mikrofon, dan hand sanitizer untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 selama bekerja di lapangan.

2. Peraturan dan Tindakan Protokol Kesehatan

Selain menggunakan peralatan kesehatan, petugas protokol juga menjalankan peraturan dan tindakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik dan penyesuaian jumlah orang dalam acara tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup penyesuaian kapasitas undangan acara yang biasanya diurutkan sesuai dengan aturan pemerintah.

3. Adaptasi terhadap Perubahan Peraturan

Petugas protokol harus beradaptasi dengan perubahan peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meskipun awalnya sulit, namun dengan waktu, peraturan ini menjadi kebiasaan bagi petugas protokol.

4. Tantangan dalam Penanganan Covid-19

Meskipun petugas protokol mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan, masih terdapat risiko terpapar Covid-19. Sejumlah petugas tenaga kesehatan (nakes) di Jawa Barat terkonfirmasi positif Covid-19, menunjukkan adanya tantangan nyata dalam menangani pandemi ini.

Dari penelitian tersebut, terlihat bahwa motivasi dalam pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 pada petugas protokol di Provinsi Jawa Barat sangat penting. Mereka harus tetap termotivasi untuk terus menjalankan protokol kesehatan, beradaptasi dengan perubahan, dan menjaga kesehatan diri sendiri serta masyarakat yang dilayani. Dalam situasi yang terus berubah, motivasi ini menjadi kunci dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan :

Penelitian tentang kinerja dan pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 pada petugas protokol di Provinsi Jawa Barat menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan, penegakan peraturan protokol kesehatan, dan kesiapan petugas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi selama pandemi. Meskipun terdapat risiko terpapar Covid-19, petugas protokol harus tetap termotivasi

9
untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab demi menjaga kesehatan masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran virus. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif, adaptabilitas, dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci dalam menangani pandemi ini secara efektif.

4.4.1 Pembahasan mengenai Perkembangan petugas dalam menjalankan pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid-19 di pemerintahan provinsi Jawa Barat guna memutus mata rantai covid-19

Berikut adalah rincian perkembangan petugas dalam menjalankan pola komunikasi implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 di pemerintahan Provinsi Jawa Barat:

1. Pencegahan Penyebaran Covid-19 oleh Petugas Prokes

- a. Petugas Prokes Covid-19 aktif melakukan pencegahan penyebaran virus di Provinsi Jawa Barat.
- b. Mereka mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19.
- c. Harapannya adalah agar petugas Prokes dapat menyadarkan dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Jawa Barat.

2. Adaptasi Kebiasaan Baru

- a. Perkembangan petugas dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru, khususnya di Jawa Barat, berkembang pesat.

- b. Aturan-aturan yang ditegaskan oleh petugas Covid-19 memberikan efek jera kepada masyarakat, mendorong mereka untuk mengikuti dan mentaati peraturan demi menghindari peningkatan kasus Covid-19.

3. Komunikasi Petugas dengan Masyarakat

- a. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi petugas cenderung bersifat regulatif, represif, dan penuh paksaan.
- b. Hal ini menyebabkan ketegangan antara penerapan protokol kesehatan dan kebutuhan harian masyarakat.
- c. Penertiban dilakukan secara rutin, termasuk penggunaan swab antigen dan sanksi kepada pelanggar.

4. Tindakan Terhadap Pelanggaran

- a. Pemangku kewenangan bertindak tegas terhadap pelanggaran kebijakan.
- b. Terdapat tiga tingkat peringatan: peringatan L dan LL berupa teguran dan denda, peringatan LLL berupa sanksi administratif dan penutupan tempat usaha selama 14 hari berturut-turut.
- c. Jika pelanggaran masih terjadi setelah peringatan-peringatan tersebut, izin usaha dapat dicabut.

5. Tujuan Akhir

- a. Hasil perkembangan petugas tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penyebaran virus dapat ditekan dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19.

Kesimpulan :

Perkembangan petugas dalam menjalankan pola komunikasi Implementasi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 di pemerintahan Provinsi Jawa Barat menunjukkan upaya yang signifikan dalam pencegahan penyebaran virus. Meskipun terdapat tantangan dalam komunikasi dan penegakan aturan, tindakan tegas terhadap pelanggaran kebijakan telah diambil untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Diharapkan bahwa dengan adanya langkah-langkah ini, penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan dan masyarakat Jawa Barat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

4.4.2 Bagaimana tanggapan masyarakat provinsi Jawa Barat dalam menerima pola komunikasi petugas dalam implementasi adaptasi kebiasaan baru (AKB) pasca pandemi COVID-19?

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggapan masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Pola Komunikasi Petugas dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi COVID-19, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakpercayaan terhadap COVID-19

Sebagian masyarakat tidak percaya akan keberadaan COVID-19 dan menganggapnya sebagai bagian dari rekayasa atau konspirasi.

2. Pandangan varlegatif tentang pandemic

Pendapat masyarakat mengenai COVID-19 bervariasi, mulai dari keyakinan penuh hingga hanya sebagian yang memercayainya.

3. Penentangan terhadap aturan pemerintah

Meskipun ada himbauan dan aturan AKB, masih banyak masyarakat yang menentang atau melanggarnya, sehingga petugas harus memberlakukan sanksi keras untuk menegakkan aturan tersebut.

4. Dukungan terhadap petugas

Namun, beberapa warga mendukung tindakan petugas dalam memberlakukan aturan AKB demi kepentingan bersama, termasuk menyelamatkan ekonomi masyarakat, dan mereka mematuhi aturan tersebut untuk tetap beraktivitas demi kehidupan keluarga.

5. Penyesuaian dengan AKB

Masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan menghindari kerumunan.

6. Dampak terhadap tatanan sosial dan ekonomi

AKB telah mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat secara keseluruhan, dengan menerapkan protokol ketat di berbagai sektor penting.

Tanggapan dan respons masyarakat Jawa Barat terhadap adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 menunjukkan beragam perilaku dan tindakan, yang mencerminkan tantangan serta upaya adaptasi dalam menghadapi situasi baru yang dihadapi.

Kesimpulan :

Hasil penelitian menyoroti tanggapan masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Pola Komunikasi Petugas dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi COVID-19. Sebagian masyarakat menunjukkan ketidakpercayaan terhadap COVID-19, sementara yang lain memiliki pandangan yang bervariasi tentang pandemi. Meskipun aturan AKB telah diberlakukan, masih ada yang menentangnya, sehingga diperlukan penegakan aturan yang ketat. Namun, ada juga masyarakat yang mendukung tindakan petugas dalam menerapkan aturan AKB demi kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan AKB dengan menerapkan protokol kesehatan. Secara keseluruhan, respons masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 mencerminkan beragam perilaku dan tindakan dalam menghadapi situasi yang baru.

4.4.3 Makna fenomenologi dari Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pandemi Covid 19

Menurut fenomenologi Alfred Schutz, penelitian tersebut mengungkap makna-makna subjektif yang ditemukan dalam pengalaman sosial petugas protokol dan masyarakat Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pola komunikasi yang efektif, adaptif, dan disiplin yang muncul dalam penelitian tersebut menunjukkan bagaimana individu dan kelompok mengorganisasikan tindakan mereka untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Hal ini mencerminkan konstruksi sosial bersama yang dibentuk oleh norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang berlaku dalam konteks pandemi.

Perkembangan petugas dalam menyesuaikan pola komunikasi pasca pandemi Covid-19 juga mencerminkan bagaimana individu membuat makna dari pengalaman mereka dalam situasi yang berubah. Langkah-langkah yang diambil oleh petugas protokol untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menunjukkan upaya kolaboratif dalam menjaga kesejahteraan bersama.

Respon yang beragam dari masyarakat terhadap pandemi dan implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga mencerminkan variasi makna yang ditemukan dalam pengalaman sosial mereka. Ketidakpercayaan, ketidaksetujuan, dan dukungan terhadap aturan AKB menggambarkan bagaimana individu menafsirkan dan merespons informasi dan tindakan yang diterima dalam konteks pandemi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok secara aktif mengkonstruksi makna-makna sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19, sesuai dengan perspektif fenomenologi Alfred Schutz.

Menurut fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok menyusun makna dan tindakan mereka dalam konteks pandemi Covid-19. Melalui analisis pola komunikasi dan respons masyarakat, kita dapat memahami bagaimana individu mengkonstruksi realitas mereka terkait pandemi, termasuk cara mereka beradaptasi dengan perubahan, mengatasi ketidakpastian, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Makna yang ditemukan dari penelitian ini mungkin mencakup konsep-konsep seperti solidaritas, kepercayaan, ketidakpastian, dan adaptasi, yang semuanya merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia dalam situasi yang kompleks seperti pandemi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Pola komunikasi yang muncul adalah pola komunikasi yang efektif, adaptif, dan disiplin yang menjadi kunci dalam menangani pandemi. Petugas protokol harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, memastikan penerapan aturan, dan tetap termotivasi. Komunikasi yang jelas dengan masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.
2. Perkembangan petugas dalam menyesuaikan pola komunikasi setelah pandemi Covid-19 di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menunjukkan upaya besar dalam mengendalikan penyebaran virus. Meskipun dihadapkan pada kendala dalam komunikasi dan penegakan aturan, langkah-langkah tegas telah diambil untuk memastikan bahwa masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.
3. Respon sebagian masyarakat masih menunjukkan ketidakpercayaan terhadap COVID-19, sementara yang lain memiliki pandangan yang bervariasi tentang pandemi tersebut. Meskipun aturan AKB telah diberlakukan, masih ada yang menentangnya, sehingga diperlukan penegakan aturan yang ketat. Namun, ada juga masyarakat yang mendukung tindakan petugas dalam menerapkan aturan AKB demi kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan AKB dengan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak. Respons ini mencerminkan kompleksitas pemikiran dan sikap masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi dan upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

4. Makna yang ditemukan mencakup konsep-konsep seperti solidaritas, kepercayaan, ketidaktentuan, dan adaptasi, yang semuanya merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia dalam situasi yang kompleks seperti pandemi.

5.2 Saran

Setelah menuliskan kesimpulan penelitian dan melihat masih adanya kekurangan dan banyak hal lain yang bisa dibahas dalam penelitian selanjutnya, maka timbulah beberapa saran yang berkaitan dengan pola komunikasi dan Implementasi Petugas Proses COVID-19 di Jawa Barat. Saran yang dapat diberikan peneliti pada peneliti selanjutnya, ialah seiring dengan meningkatnya jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia, peneliti berharap jika penelitian ini bisa dijadikan batu loncatan awal bagi para peneliti berikutnya untuk bisa lebih mengeksplorasi Pola komunikasi dan Implementasi petugas pada COVID-19 dengan lebih mendalam akan fokus lain yang belum terungkap. Peneliti selanjutnya bisa meneliti bagaimana Petugas Proses COVID-19 berkomunikasi dengan para petugas medis yang merawat mereka, bagaimana para penyintas mempertahankan komunikasi yang baik dengan keluarga sewaktu di isolasi, dan juga bagaimana pengalaman para Petugas dalam berkomunikasi dengan Masyarakat saat mendapati dirinya terpapar virus COVID-19.

Humas pemerintah memiliki tugas yang tak ringan di era pandemi. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat betapa seriusnya penyakit ini sekaligus mencegah masyarakat untuk tidak panik dan menumbuhkan optimisme. Serta, kepercayaan bahwa semua ini dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Telah menjadi pekerjaan rumah semua pelaku komunikasi publik untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat terutama dalam menerapkan kenyataan serta kebiasaan baru pada keseharian.

Humas Pemprov Jabar yang tergabung dalam Divisi Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid 19 Jawa Barat merumuskan strategi komunikasi

publik yang dinamis, strategi yang bertumbuh. Pesan kunci betul-betul dirancang dan bertugas untuk memandu keseluruhan narasi dan *tone of production*. Termasuk, menyederhanakannya ke dalam bentuk tagar di antaranya #JabarTanggapCovid19, #JabarSehatLahirBatn, #KitaPastiMenang, #AdaptasiKebiasaanBaru, dan lainnya. Adalah tantangan tersendiri ketika Divisi Komunikasi Publik harus menerjemahkan istilah-istilah asing, menyederhanakan atau membahasakan prosedur-prosedur rumit sehingga bisa dimaknai publik.

Untuk menyebarkan pesan seluasnya, semua saluran dipergunakan. Termasuk, media massa, media sosial, media luar ruang, hingga aplikasi percakapan semacam WhatsApp, dengan pesan yang disampaikan berupa multimedia, multiplatform, dan *multistakeholder*. Disadari, ini semua tentu harus melalui tahap perencanaan yang tepat. Yakni, melalui riset yang dapat memunculkan gambaran pesan maupun cara penyampaiannya dengan efektif ke masyarakat. Agar masyarakat teredukasi dan terinformasi dengan baik, konsistensi isu, program dan *key message* yang kuat adalah kunci. Untuk rencana aksi selanjutnya dari Divisi Komunikasi Publik dirancanglah beberapa langkah. Antara lain, *tracking* opini dan persepsi dengan *follow-up* hasil kajian persepsi publik dengan meneliti persepsi publik terhadap isu Covid-19; *detailing*, *accessible* dan mengupayakan komunikasi yang lebih cair, menggugah, komunikatif; *localizing and customizing local content* sampai pada level akar rumput dengan mengidentifikasi serta mengintensifkan saluran komunitas untuk meningkatkan jangkauan hingga ke pelosok.

Tesis Revisi Ribert Susanto MIK

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uniramalang.ac.id Internet Source	8%
2	jmat.stialanbandung.ac.id Internet Source	6%
3	www.prindonesia.co Internet Source	3%
4	hamiddarmadi.blogspot.com Internet Source	1%
5	jabaronline.com Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	jabar.idntimes.com Internet Source	<1%
8	republika.co.id Internet Source	<1%
9	www.beritaterkini.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off